

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan ialah untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagaimana salah satu fungsi laporan keuangan, yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah sehingga memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian maka sejauh mana *stakeholders* memanfaatkan informasi keuangan.

Reformasi keuangan Negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang mengacu pada *international best practices*.

International best practices merupakan suatu praktik atau kegiatan ekonomi yang memiliki aspek secara luas, tidak hanya mencakup pelaksanaan dan pelaporan anggaran saja, namun juga mencakup penganggaran, peraturan perpajakan, masalah terkait pasar keuangan, masalah terkait ekonomi makro, kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan masalah- masalah lain di bidang keuangan yang lebih spesifikasi (Danang, 2014:12).

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan benar, terutama yang terkait dengan masalah keuangan seperti proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran. Peraturan baru tersebut: Menjadi dasar bagi institusi Negara mengubah pola administrasi keuangan menjadi pengelolaan keuangan.

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*Good Governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai: usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara salah satunya adalah dengan memanfaatkan laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan benar, yaitu:

dengan melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan: tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Supaya dapat untuk memastikan bahwa: pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan aparatur pemerintah, maka fungsi akuntabilitas dan audit atas laporan keuangan sektor publik harus berjalan dengan baik.

Seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja sektor publik. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan maka akan membuat laporan keuangan yang berkualitas dan terciptanya pemerintah yang baik.

Menurut Rosiana (2014: 4) penggunaan dalam lingkungan pemerintah daerah yang memanfaatkan informasi laporan keuangan secara langsung meliputi: pihak eksekutif, pihak legislatif, dan pihak yudikatif. Pihak eksekutif sebagai: pengelola keuangan daerah dan pembuat laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah untuk keputusan perencanaan dan pengendalian. Pihak legislatif bertugas: mengawasi pihak eksekutif dan juga harus dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai kinerja. Pihak yudiatif juga dapat memanfaatkan informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Rosiana, 2014: 86).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadminitrasikan, serta mengola data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakatndan sebagai bahan pembilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Sedangka informasi keuangan daerah adalah: segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam

rangka penyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah.

Walapun kebutuhan informasi: masing-masing kelompok pengguna laporan keuangan tersebut berbeda, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna, sehingga tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi dari masing-masing kelompok pengguna.

Dengan berbagai kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan tersebut, pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan Negara secara terstruktur dan sistematis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan terutama bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi amanat pengelolaan keuangan Negara.

Kurang optimalnya pemanfaatan laporan keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa: laporan keuangan pemerintah belum memenuhi aspek kebermanfaatan (Fontanella, 2010:3). Lemahnya: teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri menjadi masalah yang tidak bisa di hindarkan dalam pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Di Indonesia, kesiapan sumber daya manusia pemerintah menuju tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan masih menjadi dilema. Selain itu, Fontanella (2010: 60) menjelaskan bahwa latar belakang: pendidikan berpengaruh terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain tingkat pendidikan tingkat pengalaman juga merupakan: salah satu faktor dalam menyelesaikan masalah karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang maka semakin baik dia untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada teori sikap dan perilaku menjelaskan: bahwa pengalaman merupakan bagian faktor-faktor sosial.

Penelitian ini difokuskan: pada pembahasan mengenai penggunaan catatan atas laporan keuangan (CALK). Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca,

dan laporan arus kas. Supaya dapat berbagai informasi pengguna laporan keuangan, pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan Negara secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan Rahmayani (2014: 85) yang berjudul: "Analisis Pendidikan, Pengalaman, dan Faktor Sosial Akuntansi terhadap Pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pemerintah Daerah". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Dari tiga faktor: yang diteliti (tingkat pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial), terbukti tingkat Pendidikan, Pengalaman, Faktor Sosial berpengaruh positif terhadap pemanfaatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini menunjukkan bahwa: tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman yang banyak, dan social yang baik dari pengguna mempengaruhi pemanfaatan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Tingkat pendidikan pegawai pada BPKAD Kota Metro berada pada tingkat sarjana, namun demikian sudah banyak pula pegawai BPKAD yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana Muda atau Diploma III, dan ada juga pegawai yang sudah menyelesaikan pendidikan Magister. Sebagai pegawai di BPKAD Kota Metro memiliki: bidang ilmu lulusan terakhir ekonomi pembangunan serta ada beberapa pegawai yang berlatar belakang akuntansi. Sebagaimana besar dari pegawai: khususnya yang ditempatkan dibidang keuangan atau akuntansi sudah dapat menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca. Selain itu pegawai BPKAD juga sebagai besar: sudah memahami peraturan dan ketentuan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah.

Dalam penempatan pegawai tidak berdasarkan bidang keahlian masing-masing pegawai, dimana masih banyak pegawai BPKAD yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, seperti pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi yang ditempatkan dibagian umum dan administrasi, seharusnya ditempatkan dibidang keuangan/akuntansi sehingga menunjang kinerja pegawai khususnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Jadi fenomena ini, dalam penempatan pegawai tidak berdasarkan bidang keahlian masing-masing pegawai dimana masih banyak pegawai BPKAD yang ditempatkan tidak sesuai dengan dengan bidang keahliannya, seperti pegawai berlatar belakang pendidikan akuntansi yang ditempatkan di bagian umum dan administrasi, seharusnya ditempatkan di bidang keuangan atau akuntansi sehingga menjunjung kinerja pegawai khususnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dipengaruhi oleh lama pengalaman kerja di bidang keuangan adalah di atas 7 tahun, namun demikian ada juga pegawai yang memiliki pengalaman kurang dari 7 tahun yaitu pegawai mutasi dari kabupaten lain atau dari instansi lain dikota metro, pengalaman kerja professional memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dimana bidang pengalaman ilmu lain, selain bidang keuangan atau akuntansi juga memiliki relevansi dan keterkaitan untuk memudahkan menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

Atas dasar uraian di atas, maka penelitian ini tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Faktor Sosial Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Oleh Pengguna Pengambilan Keputusan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro?
2. Apakah tingkat pengalaman berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro?

3. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro?
4. Apakah tingkat pendidikan, pengalaman dan faktor sosial bersama-sama berpengaruh terhadap pemanfaatan laporan keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengalaman, dan faktor sosial terhadap pemanfaatan Laporan Keuangan oleh pengguna pengambilan keputusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu: penulis dalam mengimplementasi teori tentang akuntansi sektor publik dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang manfaat Laporan Keuangan pengguna pengambilan keputusan pada BPKAD.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan: informasi dan menambah ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan laporan keuangan yang dilakukan BPKAD Kota Metro.

3. Bagi Pemerintah Kota Metro

Penelitian ini dapat digunakan sebagai: sumber informasi dan masukan tambahan bagi Pemerintah Kota Metro dalam upaya evaluasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan kualitas kerja Pemerintah Kota Metro.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan: jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis yang menggunakan uji statistik. Penelitian kuantitatif merupakan: penelitian dengan hipotesis tertentu (Saebani, 2008). Tujuan penelitian adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Pendidikan, Pengalaman dan Faktor Sosial Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Oleh Pengguna Pengambilan Keputusan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.